

## Dampak Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur terhadap Tingkat Pencegahan *Fraud* Pengadaan

Maria Maria<sup>1</sup>, M. Husni Mubarak<sup>2</sup>, Desi Indriasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: [mariamardjuki@polsri.ac.id](mailto:mariamardjuki@polsri.ac.id)

### Abstract

*The government has always been the most significant spending agency in many countries, which means many opportunities for government procurement fraud. Failure to implement robust measures against fraud prevention can lead to financial loss and a bad reputation. Therefore, there is an urgent need for extensive studies to understand the factors that can contribute to fraud prevention strategies among government agencies. This paper examines two factors that may promote procurement fraud prevention among government agencies in Palembang City. The two factors are an internal control system and the competency of the government apparatus. Questionnaires were distributed to 50 government units from the procurement actors. Data were thoroughly analysed using multiple regression analysis with the SPSS analysis tool. The finding showed that the prevention of procurement fraud programs was influenced by the competency of the government apparatus and internal control system. This study contributes to support in confirming the critical role of the internal control system and competency of government apparatus in enhancing fraud mitigation mechanisms. However, the government apparatus's competency did not influence fraud prevention.*

*Keywords: fraud, procurement, government, internal control, competency*

### Abstrak

Pemerintah selalu menjadi lembaga pengeluaran terbesar di banyak negara, dan berarti banyak kesempatan untuk melakukan *fraud* pengadaan pemerintah. Kegagalan dalam menerapkan tindakan tegas untuk *mencegah fraud* dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi buruk. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mengenai faktor-faktor yang kontribusi terhadap strategi pencegahan *fraud* di perangkat pemerintah. Studi ini mengkaji dua faktor yang dapat mendorong pencegahan *fraud* pengadaan di pemerintah di Kota Palembang. Dua faktor tersebut adalah sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur pemerintah. Kuesioner didistribusikan pada 50 perangkat daerah dari para pelaku pengadaan. Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda berbantuan SPSS. Temuan menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* pengadaan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pemerintah dan sistem pengendalian internal. Studi ini memberikan kontribusi untuk memperkuat peran kritis sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur pemerintah dalam meningkatkan mekanisme mitigasi *fraud*. Namun, secara parsial kompetensi aparatur pemerintah tidak mempengaruhi pencegahan *fraud*.

*Keywords: fraud, procurement, government, internal control, competency*

© 2024 Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan (JSHP). This work is licensed under CC BY-SA 4.0

## 1. Pendahuluan

Salah Satu peran penting pemerintah adalah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pada tingkat daerah, PBJ dilakukan oleh perangkat-perangkat daerah mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Peraturan terkait dengan PBJ di Indonesia yaitu peraturan presiden No 12 tahun 2021 sebagai pembaharuan dari peraturan presiden No 16 tahun 2018.

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik melibatkan pengeluaran pemerintah terbesar (Patrucco et al., 2019). Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pertengahan 2022 menunjukkan jumlah tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia menempati posisi terbanyak setelah penyuapan korupsi. Menurut laporan KPK, sepanjang tahun 2021 kasus tindak pidana korupsi di Indonesia paling banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan dengan jumlah 30 kasus (Dihni, 2022). Bentuk korupsi dimaksud terjadinya tindak kecurangan (fraud). Fraud yang terjadi dalam pemerintahan umumnya dilakukan oleh pejabat, wakil rakyat, dan mitra mereka (Zulaikha et al., 2021).

Fraud sebagai fenomena global, secara universal telah menembus sektor swasta maupun publik dan tidak ada satu negarapun yang membenarkan tindakan tersebut (Okoye & Gbegi, 2013). Fraud dilakukan seseorang untuk mendapat keuntungan dengan berbagai cara yang ilegal dan mencakup berbagai penyimpangan yang disengaja (Matthew et al., 2013). Hal ini berdampak terhadap ekonomi, hukum, dan nilai-nilai moral manusia (Abdallah et al., 2016)). Fraud tidak mungkin dihilangkan, namun hal tersebut masih dapat dikurangi dengan penerapan fraud strategi mitigasi untuk mengurangi kerugian (Berge & Torsteinsen, 2023; de Sousa et al., 2023).

Fraud merupakan kecerdikan seseorang mendapatkan keuntungan lebih dari yang seharusnya dengan memberikan informasi palsu (Velasco et al., 2021; Zahra et al., 2021). Menurut Basel Committee on Banking Supervision (Abdallah et al., 2016) fraud terdiri dari dua jenis: internal fraud dan eksternal fraud. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengurangi peluang terjadinya fraud, mengurangi tekanan terhadap pegawai sehingga mampu memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan alasan yang membenarkan atau merasionalisasi fraud. Kerangka yang baik dan konsisten prinsip-prinsip dan praktik-praktik dasar pengadaan barang dan jasa publik merupakan persyaratan hukum dalam mencegah terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa (Pope, 2007). Oleh karena itu, pencegahan fraud secara umum adalah upaya preventif yang dilakukan secara intensif dan terintegrasi dengan tujuan mencegah dan meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan fraud. Sebagaimana disebutkan dalam segitiga fraud (Cressey, 1973), fraud terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi.

Banyaknya kasus fraud dalam proses PBJ membutuhkan pengendalian internal pemerintah yang serius. Disamping itu, kompetensi aparaturnya juga memegang peranan penting dalam mencegah tindak kecurangan pengadaan barang dan jasa. Pengendalian internal memiliki peran penting dalam mencegah fraud sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dapat mencegah dan mempersulit fraud. Penelitian ini berfokus pada SPI pemerintah dan kompetensi aparaturnya terhadap pencegahan fraud pengadaan. Penelitian dilakukan di seluruh perangkat daerah kota Palembang dengan pertimbangan setiap perangkat daerah dimanapun terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Pengendalian internal memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen akan meningkatkan kelengkapan dan akurasi data. Dalam COSO, 2013 disebutkan ada lima komponen pengendalian internal: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pengawasan. SPI merupakan persyaratan mendasar yang harus diperhitungkan oleh setiap entitas pengadaan ke dalam struktur pengelolanya. Penelitian yang dilakukan (Joseph et al., 2015), pengendalian internal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Temuan penelitian Hamdani & Albar, 2016 menegaskan kelemahan SPI dapat menyebabkan fraud. Singleton & Singleton (2010) berpendapat bahwa untuk melawan aktivitas fraud perlu adanya pengendalian. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wicaksono et al. (2017) dan Zakaria et al. (2016) bahwa SPI tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Pada dasarnya kecurangan yang terjadi muncul akibat adanya kesempatan.

Sebaliknya menurut Rendon & Rendon (2016), pengendalian internal memastikan proses pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pencegahan fraud dapat dilakukan dengan meminimalisasi risiko kerugian fraud, melalui rancangan pengendalian internal bagi seseorang yang berpeluang melakukan fraud. Fraud dapat dicegah dengan meminimalisasi risiko fraud dan merencanakan pengendalian internal bagi mereka yang melakukan fraud (Hoai et al., 2022; Shonhadji & Maulidi, 2022). Meskipun fraud dalam beberapa kasus tidak dapat sepenuhnya dicegah, namun dapat dideteksi dengan menerapkan pengendalian internal. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa

Sementara itu, prestasi kerja, kreativitas, dan moral mengacu pada faktor-faktor yang berkontribusi pada suatu organisasi (La Rosa et al., 2022; Mahmud et al., 2022; Sari et al., 2021). Lebih lanjut Cheng et al. (2002) menyatakan, kompetensi adalah orang yang memiliki pengetahuan (pendidikan, pengalaman dan keterampilan) dan perilaku etis dalam karya. Kompetensi aparatur pemerintah dan pencegahan fraud didasari dari pendekatan teori stewardship. Teori ini merujuk pada teori stewardship bahwa sikap pelayanan perilaku terjadi ketika kepentingan individu atau pribadi diubah atau diselaraskan dengan kepentingan umum (Davidson, 2022; Juliana et al., 2021).

Teori stewardship menjelaskan keterkaitan antara pengelola dengan pemilik (masyarakat), yang mempercayakan pengelola layanan publik memiliki sifat integritas baik; dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan jujur. Teori ini memandang pemerintah sebagai pengelola yang memiliki kemampuan, siap melakukan tindakan dan fungsi terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsep dalam teori ini adalah kepercayaan kepada pihak yang diberi kewenangan, sehingga pemerintah (steward) dalam suatu entitas sebagai pelayan yang baik (Bernstein et al., 2016). Dalam hal ini pemerintah sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa akan mengerahkan seluruh kemampuannya tidak melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga menghasilkan pengadaan yang jujur, adil, transparan dan bebas dari fraud. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 10, kompetensi adalah kemampuan setiap karya individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi aparatur pemerintah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 dinyatakan bahwa pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan pokja pemilihan harus memiliki sertifikat (bersertifikasi).

Kompetensi aparatur pemerintah menjadi komponen vital mengingat kemampuan seseorang merupakan faktor internal dalam capaian kinerja. Dengan demikian pengadaan barang dan jasa publik membutuhkan keterampilan atau akuntabilitas pemerintah dalam mengelola keuangan sesuai dengan amanat dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut mampu melakukan pekerjaannya, jujur, dan tidak menyalahgunakan jabatannya.

H2 : Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah

Merujuk pada uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian, yaitu: 1) apakah sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur pengadaan berpengaruh terhadap tindak pencegahan fraud 2) Faktor yang mana lebih dominan antara pengendalian internal dengan kompetensi aparatur. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi

sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur pengadaan terhadap tindak pencegahan fraud di pemerinmtah kota Palembang, baik secara simultan maupun parsial.

## 2. Metodologi

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan rincian berikut.

### 2.1 Populasi dan sample penellitian

Populasi penelitian adalah semua perangkat daerah di pemerintah kota Palembang sejumlah 51 perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh. Dengan demikian jumlah sampel penelitian sejumlah populasinya. Namun, data yang dapat diolah (lengkap) dari hasil pengembalian kuesioner hanya ada 50 perangkat daerah. Unit observasi adalah kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan.

### 2.2 Operasional Variabel penelitian

Variabel independen terdiri dari: sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur pemerintah. Variabel dependen: pencegahan fraud pengadaan. Sistem pengendalian internal merujuk pada PP No.60/2008 dan Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) (2013) dengan dimensi: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pengawasan. Kompetensi aparatur pemerintah terdiri dari tiga dimensi: pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan (Cheng et al., 2002). Pencegahan fraud merujuk pada Pope (2007), yaitu: kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, pendelegasian wewenang, pemeriksaan dan audit independen. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran likert 5 poin. Skala Likert dimaksud menggunakan penilaian yang diringkas dalam kategori "interval data" (Cooper & Schindler, 2017).

### 2.3 Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian

Hasil uji validitas

Tabel 1 Sistem Pengendalian Internal

Item Pertanyaan	Nilai rhitung	Nilai rtabel (n=30)	Keterangan
X1.1	0.7911	0,3061	Valid
X1.2	0.6340	0,3061	Valid
X1.3	0.4760	0,3061	Valid
X1.4	0.6682	0,3061	Valid
X1.5	0.6360	0,3061	Valid
X1.6	0.7454	0,3061	Valid
X1.7	0.7298	0,3061	Valid
X1.8	0.4210	0,3061	Valid

Sumber: hasil olahan SPSS

Tabel 2 Kompetensi Aparatur Pengadaan

Item Pertanyaan	Nilai rhitung	Nilai rtabel (n=30)	Keterangan
X2.1	0.7162	0,3061	Valid
X2.2	0.7925	0,3061	Valid
X2.3	0.6886	0,3061	Valid
X2.4	0.8392	0,3061	Valid
X2.5	0.8757	0,3061	Valid
X2.6	0.8379	0,3061	Valid
X2.7	0.8223	0,3061	Valid
X2.8	0.7615	0,3061	Valid
X2.9	0.3247	0,3061	Valid
X2.10	0.5344	0,3061	Valid

Sumber: hasil olahan SPSS

Tabel 3 Pencegahan Fraud Pengadaan

Item Pertanyaan	Nilai rhitung	Nilai rtabel (n=30)	Keterangan
Y.1	0.7719	0,3061	Valid
Y.2	0.6729	0,3061	Valid
Y.3	0.6754	0,3061	Valid
Y.4	0.7273	0,3061	Valid
Y.5	0.6601	0,3061	Valid
Y.6	0.4791	0,3061	Valid
Y.7	0.5759	0,3061	Valid
Y.8	0.4872	0,3061	Valid
Y.9	0.4177	0,3061	Valid
Y.10	0.3856	0,3061	Valid
Y.11	0.6656	0,3061	Valid
Y.12	0.3542	0,3061	Valid

Sumber: hasil olahan SPSS

Hasil uji reliabilitas.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Reliabilitas	Keteran gan
X1	0,780	Reliabel
X2	0,877	Reliabel
Y	0,819	Reliabel

Sumber: hasil olahan SPSS

### 3.Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji apakah sistem pengendalian internal dan kompetensdi aparatur pemerintah berkontribusi terhadap pencegahan fraud pengadaan. Tabel 5 menampilkan hasil analisis regresi.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients a					
Model	Unstandardised Coefficients		Standardised Coefficients		
	$\beta$	Std. Error	t	Sig.	
1 (Constant)	12.146	5.426	2.239	.000b	
Sistem Pengendalian Internal	.541	.210	.359	2.579	.013
Kompetensi Aparatur Pengadaan	.038	.130	.041	.296	.768

Sumber: hasil olahan SPSS

#### Hipotesis 1

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai t hitung pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pencegahan penipuan adalah 2,579 dengan nilai signifikansi 0,013. Oleh karena itu, Hipotesis 1 diterima. Hasil menyiratkan bahwa sistem pengendalian internal memfasilitasi pelaksanaan program mitigasi fraud Itu hasil pengujian ini sesuai dengan CIMA yang menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan implementasi yang baik atas sistem pengendalian internal. Pengendalian diperlukan untuk melawan aktivitas penipuan (Singleton & Singleton, 2010).

#### Hipotesis 2

Koefisien beta untuk kompetensi aparatur pengadaan senilai 0,296 dengan signifikansi 0,768. Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi pada perangkat daerah kota Palembang tidak memberi ide/ketrampilan untuk mengedepankan program-program anti korupsi. Dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (2,01174) dengan tingkat dignifikansi 0,768, maka H2 ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Peningkatan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan tidak mencegah terjadinya tindakan fraud. Tenuan ini sejalan dengan teori Cressey (1973), bahwa fraud dilakukan karena tekan,kesempatan, dan rasionalisasi. Budaya etis yang buruk dapat menjadi salah satu penyebab fraud. Jadi kompetensi seseorang tidak dapat mencegah terjadinya fraud.

Hasil uji statistik untuk uji simultan (uji F) diperoleh dari tabel ANOVA yang ditunjukkan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVAa					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	26.830	2	13.415	3.349	.044b
Residual	188.290	47	4.006		
Total	215.120	49			

a. Dependent Variable: T.Y

b. Predictors: (Constant), T.X2, T.X1

Sumber: Sumber: hasil olahan SPSS

Tabel 6 menunjukkan bahwa F hitung (3,349) lebih besar dari F tabel (2,81), dengan tingkat kekeliruan  $\alpha$  5%.. Hasil ini menunjukkan sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur pengadaan secara simultan memengaruhi pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di pemerintah kota Palembang. Untuk melihat besaran pengaruh secara simulatan sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur pengadaan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.353 <sup>a</sup>	.125	.087	2.00154

a. Predictors: (Constant), T.X2, T.X1

b. Dependent Variable: T.Y

Sumber: hasil olahan SPSS

Koefisien determinasi menunjukkan nilai R square sebesar 0,125. Dengan demikian, pengaruh variabel pencegahan fraud sebesar 12,50% sedangkan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memengaruhi pencegahan fraud sebesar 87,50%.

**Pengaruh SPI dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, terhadap Pencegahan Fraud.**

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, SPI dan Kompetensi Aparatur Pemerintah berkontribusi terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Palembang dengan persentase sebesar 12,5%. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai (3,349) > (3,20). Selain itu, dilihat juga dari tingkat signifikansinya diperoleh 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 atau 5% sehingga dapat dinyatakan secara keseluruhan variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu, secara simultan kedua komponen di atas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Namun kontribusi SPI dan kompetensi aparatur pemerintah memiliki hubungan selang dengan koefisien korelasi 2%-39,9% berada pada kategori rendah.

Adanya peningkatan sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur pemerintah yang optimal akan meningkatkan upaya pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Palembang. Hal ini juga didukung oleh hasil uji koefisien determinasi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil uji tersebut diketahui nilai R Square sebesar 0,125 yang berarti besarnya pengaruh yang diberikan oleh penerapan sistem pengendalian intern, kompetensi aparatur pemerintah terhadap upaya tindak pencegahan fraud sebesar 12,5%. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait dengan pelaksanaan proses seleksi penyedia atau kontraktor harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan praktik yang terbuka dan transparan untuk mendukung persaingan yang sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip pelaksanaan barang dan jasa yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 bahwa pengadaan dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Unsur prosedur transparan pada pemerintah Kota Palembang telah berjalan dengan baik.

Upaya pencegahan fraud pengadaan yaitu dengan lebih memaksimalkan pembagian wewenang atau tugas dalam setiap pekerjaan. Ini dapat dilihat pada frekuensi jawaban responden terendah yaitu pada dimensi upaya pencegahan fraud dengan indikator pelimpahan wewenang. Apabila pelimpahan wewenang dalam perangkat daerah pemerintah Kota Palembang baik dan maksimal, maka tingkat upaya pencegahan fraud pengadaan pemerintah Kota Palembang akan meningkat.

### **Pengaruh SPI terhadap Pencegahan Fraud.**

Hasil pengujian (tabel 5) menunjukkan nilai  $t$  hitung SPI terhadap pencegahan kecurangan (2,579) >  $t$  tabel (2,01174). Pada  $\alpha$  5%, diputuskan untuk menerima  $H_a$ . Hasil tersebut, SPI berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. SPI dengan grand mean 3.568 berarti SPI pengadaan mendukung upaya pencegahan fraud. Sistem pengendalian internal yang memiliki dimensi: lingkungan pengendalian (control environment), penilaian risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication), dan pemantauan (monitoring) memengaruhi upaya pencegahan fraud pengadaan pada OPD di pemerintah Kota Palembang. Semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian internal, maka akan semakin baik pula tingkat pencegahan fraud pengadaan pada OPD di pemerintah Kota Palembang.

Dimensi SPI yang paling dominan adalah informasi dan komunikasi serta dimensi lingkungan pengendalian. Hasil kategorisasi jawaban menunjukkan bahwa responden menjawab skor tinggi pada dimensi lingkungan kontrol sebesar 64%, dan sangat tinggi sebesar 4%. Pada dimensi informasi dan komunikasi, jawaban responden pada skala tinggi adalah 72%. Ini membuktikan dominasi lingkungan yang terkendali, informasi, dan komunikasi adalah dimensi yang kuat. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Hamdani dan Albar (2016), bahwa pengendalian internal yang kuat dapat mencegah terjadinya fraud. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya (Joseph et al., 2015), bahwa pengendalian internal memiliki korelasi positif dan signifikan dengan pencegahan fraud.

### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Pencegahan Fraud.**

Hasil pengujian (tabel 5) bahwa nilai  $t$  hitung kompetensi aparatur pemerintah dalam pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa (0,296) lebih rendah dari  $t$  tabel (2,01174) dengan signifikansi 0,768. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah (aparatur pengadaan) tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Kompetensi aparatur tidak memberikan pengaruh. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan individu tidak mengurangi terjadinya kecurangan. Hal ini sejalan dengan teori Cressey (1973) bahwa fraud dilakukan karena adanya tekanan, peluang, serta rasionalisasi. Kondisi budaya etik yang buruk dapat memicu terjadinya kecurangan. Kompetensi individu tidak mencegah seseorang dari tindakan fraud. Kompetensi yang baik tidak hanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga membutuhkan adanya keyakinan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan agar tidak mudah tergoda untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban pekerjaannya.

## **4. Kesimpulan**

Penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal pengadaan barang dan jasa pemerintah kota Palembang berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengadaan. Kompetensi aparatur di bidang pengadaan tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Kurang optimalnya monitoring oleh pelaku pengadaan menjadi salah satu pemicunya. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pembuat kebijakan yang akan menerapkan strategi pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerangka hukum, transparansi prosedur, membuka dokumen tender dan penawaran harus dipertimbangkan secara serius. Perilaku aparatur pengadaan baik langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam proses pengadaan dapat menjadi penyebab utama fraud pengadaan. Pihak manajerial diharapkan dapat membuat kebijakan yang lebih sensitif, jujur, dan akuntabel terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kompetensi aparatur pemerintah perlu ditingkatkan dengan mengedepankan budaya etis dan menerapkan pengendalian dengan aspek kegiatan penilaian (kebijakan dan prosedur), informatif, dan komunikatif.



## 5. Ucapan Terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak; responden yang berkenan dalam keterlibatan penelitian ini, terkhusus pada pimpinan Politeknik Negeri Sriwijaya dan P3M sebagai pusat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, A., Maarof, M. A., & Zainal, A. (2016). Fraud detection system: A survey. *Journal of Network and Computer Applications*, 68, 90–113. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.04.007>
- Berge, D. M., & Torsteinsen, H. (2023). Governance challenges of different institutional logics and modes of organising: a Norwegian case study of municipal water supply. *Local Government Studies*, 49(3), 471–491. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1942853>
- Bernstein, R. S., Buse, K., & Bilimoria, D. (2016). Revisiting Agency and Stewardship Theories. *Nonprofit Management and Leadership*, 26(4), 489–498. <https://doi.org/10.1002/nml.21199>
- Cheng, R. H., Engstrom, J. H., & Kattelus, S. C. (2002). Educating Government Financial Managers: University Collaboration between Business and Public Administration. *Journal of Government Financial Management*, 51(3), 10–15.
- Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control—Integrated Framework*.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2017). *Metode penelitian bisnis. Buku 1 (12th ed.)*. Salemba Empat.
- Cressey, D. R. (1973). *Other people's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Patterson Smith.
- Davidson, R. H. (2022). Who did it matters: Executive equity compensation and financial reporting fraud. *Journal of Accounting and Economics*, 73(2–3), 101453. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2021.101453>
- De Sousa, L., da Cruz, N. F., & Fernandes, D. (2023). The quality of local democracy: an institutional analysis. *Local Government Studies*, 49(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1882428>
- Dihni, V. A. (2022, March 7). Sumatera Selatan, Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak pada 2021. *Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/sumatera-selatan-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-pada-2021#:~:text=Sumatera%20Selatan%2C%20Provinsi%20dengan%20Kasus%20Korupsi%20Terbanyak%20pada%202021,-Politik&text=Menurut%20laporan%20Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi,Selat an%20dengan%20jumlah%2030%20kasus.>
- Hamdani, R., & Albar, A. R. (2016). Internal controls in fraud prevention effort: A case study. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 127–135. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art5>
- Hoai, T. T., Hung, B. Q., & Nguyen, N. P. (2022). The impact of internal control systems on the intensity of innovation and organizational performance of public sector organizations in Vietnam: the moderating role of transformational leadership. *Heliyon*, 8(2), e08954. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08954>
- Joseph, O. N., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention* ISSN, 4(1), 47–57. [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org)
- Juliana, L., Johari, R. J., Said, J., & Sensi Wondabio, L. (2021). The Effects of Tone at the Top and Professional Skepticism on Fraud Risk Judgment Among Internal Auditors

- in Indonesia. *Management and Accounting Review*, 20(1), 139–154. <https://doi.org/10.24191/MAR.V20i01-07>
- La Rosa, F., Bernini, F., & Terzani, S. (2022). Does corporate and country corruption risk affect CEO performance? A study of the best-performing CEOs worldwide. *European Management Journal*, 40(2), 234–246. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2021.05.002>
- Mahmud, N. M., Mohamed, I. S., & Arshad, R. (2022). The supply-side of corruption: a review of scenario, causes and prevention measure. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 34–44. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2021-0120>
- Matthew, K., Patrick, K., & Denise, K. (2013). The Effects of Fraudulent Procurement Practices on Public Procurement Performance. The effects of fraudulent procurement practices on public procurement performance. *International Journal of Business and Behavioral Sciences*, 3(1), 17–27. <https://www.researchgate.net/publication/236208095>
- Okoye, E. I., & Gbegi, D. O. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(3). [www.hrmars.com/journals](http://www.hrmars.com/journals)
- Patrucco, A. S., Moretto, A., Ronchi, S., & Luzzini, D. (2019). Organisational choices in public procurement: what can public management learn from the private sector? *Local Government Studies*, 45(6), 977–1000. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1608827>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pub. L. No. 12, 1 (2021).
- Pope, J. (2007). *Strategi Memberantas Korupsi : Elemen Sistem Integritas Nasional* (2nd ed.). Jakarta Bumi Aksara.
- Rendon, J. M., & Rendon, R. G. (2016). Procurement fraud in the US Department of Defense. *Managerial Auditing Journal*, 31(6/7), 748–767. <https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2015-1267>
- Sari, T. K., Cahaya, F. R., & Joseph, C. (2021). Coercive Pressures and Anti-corruption Reporting: The Case of ASEAN Countries. *Journal of Business Ethics*, 171(3), 495–511. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04452-1>
- Shonhadji, N., & Maulidi, A. (2022). Is it suitable for your local governments? A contingency theory-based analysis on the use of internal control in thwarting white-collar crime. *Journal of Financial Crime*, 29(2), 770–786. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0128>
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (4th ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118269183>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pub. L. No. 13, 1 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/31128/UU%20Nomor%2013%20Tahun%2003.pdf>
- Velasco, R. B., Carpanese, I., Interian, R., Paulo Neto, O. C. G., & Ribeiro, C. C. (2021). A decision support system for fraud detection in public procurement. *International Transactions in Operational Research*, 28(1), 27–47. <https://doi.org/10.1111/itor.12811>
- Wicaksono, A. P., Urumsah, D., & Asmui, F. (2017). The Implementation of E-procurement System: Indonesia Evidence. *SHS Web of Conferences*, 34, 10004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20173410004>
- Zahra, F., Abdullah, M. I., Kahar, A., Din, M., & Nurfalah, N. (2021). Preventing Procurement Fraud in E-purchasing for Indonesian Local Governments. *Journal of*

Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 505–511.  
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0505>

Zakaria, K. M., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). Internal controls and fraud – empirical evidence from oil and gas company. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 1154–1168. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2016-0021>

Zulaikha, Z., Hadiprajitno, P. T. B., Rohman, A., & Handayani, Rr. S. (2021). Effect of attitudes, subjective norms and behavioral controls on the intention and corrupt behavior in public procurement: Fraud triangle and the planned behavior in management accounting. *Accounting*, 7(2), 331–338. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.11.020>